



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 16 Desember 2023

Halaman: 3

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tak Ada Fakir Miskin di Kota Jogja

UMBULHARJO—Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Jogja, Maryustlon Tonang menyebut tak ada lagi fakir miskin di Kota Jogja.

Data ini berdasarkan hasil verifikasi dan validasi (verval) DTKS (tata terpadu kesejahteraan sosial) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Dia menyebut, data itu akan diverifikasi kembali. Setidaknya ada tujuh parameter lokal yang digunakan.

Itu bersumber dari DTKS, dimanfaatkan Kemensos menggunakan APBN. Sehingga di masing-masing daerah sudah teralokasikan KPM yang mendapatkan bantuan sosial.

Maryustlon Tonang
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Jogja

Fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari. Keputusan Menteri Sosial No.262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin. "Di antaranya, pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya," kata Maryustlon, Jumat (15/12).

Setelah dilakukan verval, nantinya akan muncul nilai. Nilai itu nantinya terbagi menjadi tiga kategori. Jika nilai verval menunjukkan angka 76-100, maka akan masuk dalam keluarga penerima manfaat (KPM) 1 atau fakir miskin. Jika nilai menunjukkan angka 51-75, maka masuk dalam KPM 2 atau miskin, dan nilai 31-50 masuk dalam KMS 3 atau rentan miskin. Sejauh ini, tak ada warga Kota Jogja yang memiliki nilai verval DTKS 76-100. Itu tandanya tak ada fakir miskin di Kota Jogja. Sementara, untuk warga miskin atau kategori KMS 2 tercatat ada 2.465 KK atau 6.283 jiwa. "Sedangkan, KMS 3 atau warga rentan miskin ada 17.451 KK atau 49.121 jiwa," katanya.

Data ini selanjutnya menjadi dasar Dinsosakertrans Kota Jogja untuk melakukan intervensi yang diwujudkan dalam berbagai wujud bantuan sosial. Misalnya, santunan kematian, asistensi sosial lanjut usia miskin (Aslum), dan berbagai program lainnya. Ini dikover menggunakan APBD Kota Jogja. Sementara, ada juga bantuan sosial yang menggunakan APBN. Di antaranya, program PKH dan bantuan sembako.

"Itu bersumber dari DTKS, dimanfaatkan Kemensos menggunakan APBN. Sehingga di masing-masing daerah sudah teralokasikan KPM yang mendapatkan bantuan sosial," katanya. (Akh Anissa Harini)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005